

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Yuanita Utami ¹, Halilul Khairi ², Ika Sartika ³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: ika_sartika@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi dan informatika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua dimensi tambahan dari dimensi efektivitas yang diungkap oleh Sutrisno, yaitu pengendalian dan dukungan pimpinan. Dari ketujuh dimensi, efektivitas penerapan SRIKANDI belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat sebagai berikut: ketersediaan dukungan infrastruktur, kemampuan SDM pengguna, kelengkapan proses bisnis aplikasi, keandalan sistem, budaya organisasi, dan isu keamanan. Adapun rencana aksi untuk mencapai efektivitas yaitu fasilitasi penyediaan infrastruktur yang memadai, penguatan kemampuan teknis bagi pengguna, penyempurnaan proses bisnis aplikasi, penyempurnaan keandalan sistem, pengendalian secara berkala dan berkelanjutan, dan peningkatan keamanan aplikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya tujuh dimensi efektivitas penerapan program yang terdiri atas: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata, pengendalian, dan dukungan pimpinan, sudah ada dan melekat pada penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal

Kata kunci:

efektivitas,
SRIKANDI,
e-government.

Keywords:

effectiveness,
SRIKANDI,
e-government.

This research departs from efforts to realize a more effective and efficient government through the use of technology and informatics as mandated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of an integrated dynamic archival information system in the Kendal Regency Government, Central Java Province. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The results showed that there were two additional dimensions of the effectiveness dimension revealed by Sutrisno, namely control and leadership support. Of the seven dimensions, the effectiveness of SRIKANDI implementation has not fully run optimally so it is necessary to take corrective steps by taking into account the following inhibiting factors: availability of infrastructure support, user HR capabilities, completeness of application business processes, system reliability, organizational culture, and security issues. The action plan to achieve effectiveness is the facilitation of providing adequate infrastructure, strengthening technical capabilities for users, improving application business processes, improving system reliability, periodic and continuous control, and improving application security. The conclusion of this study is that there are seven dimensions of program implementation effectiveness consisting of: program understanding, target

accuracy, timeliness, goal achievement, real change, control, and leadership support, already exist and are attached to the implementation of SRIKANDI in Kendal Regency Government

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan TIK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan yang berdampak pada layanan publik yang lebih baik (Mohi & Botutihe, 2020; Warman et al., 2022). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal istilah *e-government* adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pemerintah dan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah (Choirunnisa et al., 2023; Rusdy & Flambonita, 2023). Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, diluncurkan beberapa aplikasi umum guna mewujudkan tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien (Annisa, 2022).

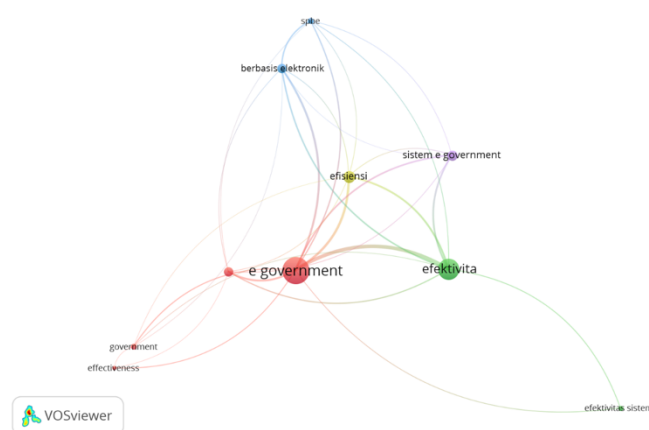
Dengan penggunaan aplikasi umum bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, secara perspektif ekonomi, dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan aplikasi sejenis yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dalam Berita Online Republika.co.id pada tanggal 12 Juli 2022 bahwa terdapat 400.000 aplikasi yang membutuhkan pembiayaan, sementara menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejumlah 24.400 aplikasi pemerintah yang sudah berhasil diidentifikasi akan dipangkas dan digantikan dengan 8 (delapan) aplikasi umum. Selain itu, pusat data dan server sejumlah 2700 menyulitkan untuk menyatukan data pemerintahan, sehingga akan dibuat Pusat Data Nasional yang akan dikendalikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada Tahun 2020, keberadaan aplikasi SRIKANDI diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, pelaksana ketentuan pasal 36 dan pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa setiap instansi pusat maupun daerah diharuskan beralih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam penciptaan naskah dinas, pendistribusian serta pengarsipannya. Dalam merespon terbitnya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal bersedia menjadi pilot project penerapan aplikasi SRIKANDI. Berdasarkan kondisi pengamatan awal peneliti, penerapan masih belum optimal yang terindikasi dari pengguna aktif SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten dari sejumlah 4.699 unit kerja dengan ketersediaan user aktif baru pada angka 3.863 pengguna.

Pengguna SRIKANDI seharusnya adalah sejumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu 9428 jiwa. Dengan demikian menunjukkan bahwa pengguna yang aktif menggunakan SRIKANDI memenuhi 3.863 dari 9.428 pegawai, sehingga baru terpenuhi 40,97%. Berdasarkan angka yang terbilang masih rendah dalam penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal juga disebabkan ketidaksiapan Aparatur Sipil Negara untuk mengubah mekanisme kerja mereka yang semula pembuatan naskah dinas serta pengelolaan arsip dilaksanakan secara manual menjadi elektronik.

Ketidaksiapan pengguna juga akibat masih terdapat blankspot atau wilayah yang tidak terdapat sinyal internet di 22 desa di Kabupaten Kendal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal menjelaskan, 22 desa dengan wilayah blankspot tersebar di lima kecamatan di antaranya Kecamatan Pageruyung, Singorojo, Kaliwungu Selatan, Limbangan, dan Ringinarum. Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana akses internet ini dilakukan secara bertahap dengan target sampai dengan 2024, dengan prioritas akses internet bagi sekolah-sekolah. Dari total jumlah desa yaitu 266 desa, 22 desa terdapat *blankspot*, mengindikasikan layanan berbasis internet termasuk aplikasi SRIKANDI terkendala untuk diterapkan secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Kendal.

Hasil olah data Vosviewer menjelaskan letak *state of the art* penelitian ini berdasarkan database google scholar pada aplikasi Harzing's Publish or Perish, data penelitian terdahulu dengan menggunakan kata kunci "efektivitas penerapan sistem e-government" didapati 990 artikel pada periode penelitian 2019 s.d. 2023. Semakin kecil bulatan yang ditunjukkan pada Gambar 1 maka semakin sedikit penelitian tersebut terindeks *google scholar*. Letak kebaruan penelitian ini adalah kontribusi pembahasan efektivitas penerapan sistem kearsipan dalam lingkup e-government.



Gambar 1. State of Art (Sumber: Vosviewer, data diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti akhirnya menentukan fokus penelitian berdasarkan ketertarikan lebih jauh tentang “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tyas Ayu Handayani yang membahas tentang dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Ke-Bijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting terkait efektivitas penerapan SRIKANDI. Pertama, disposisi atau sikap pelaksana memiliki peran yang signifikan dalam kesuksesan implementasi, sebagaimana disoroti oleh komentar dari narasumber kunci. Kedua, disposisi berperan krusial saat SRIKANDI diterapkan di tingkat operasional, khususnya di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketiga, disposisi memiliki kemampuan untuk mengikat secara mental dan moral semua pemangku kepentingan terkait. Terakhir, disposisi sangat dipengaruhi oleh keinginan politis dari Kepala Daerah (Handayani, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem ini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen arsip di lingkungan pemerintahan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap penyimpanan, pencarian, dan pemeliharaan arsip, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk memberikan dasar bagi pengembangan dan peningkatan sistem serupa di entitas pemerintahan lainnya, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Rukin, 2019; Syahrizal & Jailani, 2023). Desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan atau objek yang diteliti, kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data penelitian, peneliti menggunakan data primer berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder yang berasal dari laporan-laporan, catatan, atau dokumen dari para informan. Penelitian ini mengadaptasi efektivitas yang dikemukakan Sutrisno dalam lima dimensi: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan criterion based selection. Adapun yang menjadi kriteria informan adalah Bupati Kendal, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Direktur Kearsipan Daerah II, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam melakukan analisis data penelitian, peneliti menggunakan software Nvivo dengan tahapan: manajemen data non-numerik di nvivo, data *skimming and scanning*, koding, visualisasi data, analisis isi kualitatif (*content qualitative analysis*), *cross-case analysis*, interpretasi hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data (Bandur & Budiastuti, 2018).

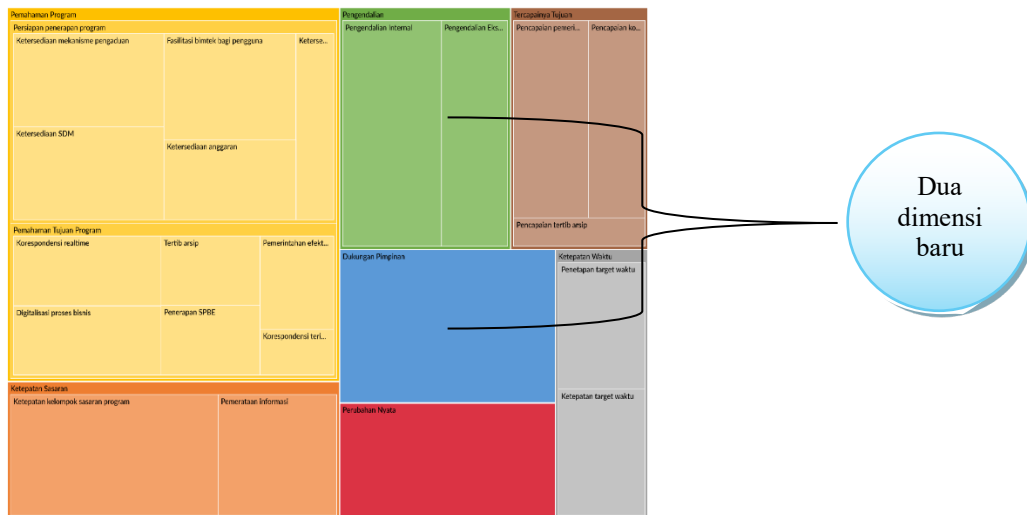
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu peneliti mengecek kebenaran data atau keabsahan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dengan teknik wawancara, kepada informan yang berbeda-beda, untuk menghasilkan data yang sama. Dalam hal ini peneliti memberikan teknik wawancara semi terstruktur kepada para informan, kemudian dengan pertanyaan yang sama peneliti mengonfirmasi dan menganalisis kebenaran jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal

Penerapan SPBE di Indonesia merupakan upaya mempercepat pelayanan di berbagai bidang, termasuk dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dapat memberikan dampak positif untuk menjalankan pemerintahan yang lincah. Selanjutnya dalam mencapai kepuasan layanan yang diterima masyarakat telah menjadi ukuran keberhasilan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ada beberapa Indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sebuah program atau suatu kegiatan diantaranya:

1. Pemahaman program. Pada indikator ini yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami.
2. Ketepatan sasaran. Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.
3. Ketepatan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.
4. Tercapainya tujuan. Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah dicapai.
5. Perubahan nyata. Indikator ini dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana serta memberikan perubahan bagi para warga masyarakat. Perubahan bisa terjadi dalam kategori dampak positif maupun negatif (Amrynudin et al., 2021).



Gambar 2. Hierarchy Chart Dimensi Efektivitas Penerapan SRIKANDI

Berdasarkan proses *import* sumber data dan *coding* melalui *NVivo*, ditemukan dua dimensi baru yang muncul yaitu dukungan pimpinan dan pengendalian. *Hierarchy chart* menunjukkan terdapat dua dimensi yang mempunyai kontribusi terbesar dalam efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu: pemahaman Program dan ketepatan sasaran.

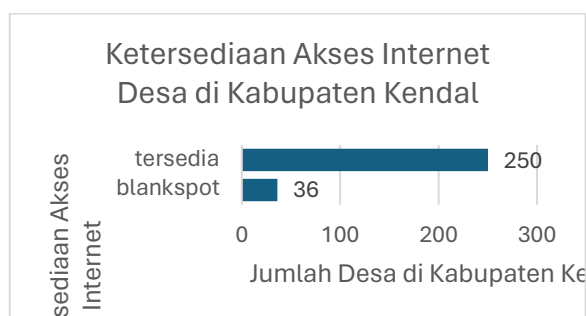
Pemahaman Program

Dalam memahami program penerapan aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal, pertama, persiapan penerapan program sehingga pada saat implementasinya dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan terukur. Dalam rangka persiapan penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal, terdapat

lima hal yang perlu dipastikan ketersediaannya yaitu: ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan mekanisme pengaduan, fasilitasi bimbingan teknis bagi pengguna, ketersediaan anggaran, serta ketersediaan akses internet.

Menurut informan yang merupakan kelompok sasaran kebijakan, yakni Bapak Dico M. Ganinduto, B.Sc. selaku Bupati Kendal, menyatakan bahwa dalam rangka penerapan aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal didukung dengan ketersediaan akses internet, anggaran, serta sumber daya manusia yang memadai untuk kelompok sasaran perangkat daerah yang lokasinya tidak jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Kendal. Meskipun ia menyadari bahwa pada beberapa titik area masih lemah dalam menangkap sinyal internet.

Menurut Bapak Ardhi Prasetyo, S.STP, M.M. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, menyampaikan penekanan pada ketersediaan infrastruktur ini menjadi sangat penting, dalam lingkup perangkat daerah, sampai dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kecamatan sudah cukup baik. Namun beberapa area desa masih belum terjangkau akses internet. Menurut data yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa terdapat 36 desa/kelurahan dari 8 kecamatan di Kabupaten Kendal yang merupakan *blankspot*.



Gambar 3. Ketersediaan Akses Internet Desa di Kabupaten Kendal

Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan 87,41% ketersediaan akses internet desa di Kabupaten Kendal. Sedangkan ketersediaan akses internet untuk perangkat daerah yang dapat dilihat dalam lampiran hasil penelitian ini, terdapat 100 perangkat daerah yang telah terhubung dengan koneksi jaringan Internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal pada kelompok perangkat daerah/UPTD/UPTB/Korwil se-Kabupaten Kendal, sedangkan 118 lainnya belum terhubung jaringan internet. Dari data penelitian tersebut menunjukkan 54,13% perangkat daerah belum mendapatkan akses internet secara memadai yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Dengan demikian, efektivitas penerapan SRIKANDI pada *cluster* pemerintah desa mencapai 87,41%, namun jika dilihat dari jumlah perangkat daerah baru mencapai 45,87%.

Adapun *child code* pada dimensi pemahaman program lainnya yaitu pemahaman tujuan program. Berdasarkan tanggapan tersebut dilakukan *coding* ke dalam beberapa *child codes* yaitu dalam rangka mewujudkan korespondensi secara *realtime*, melaksanakan digitalisasi proses bisnis pelayanan administrasi pemerintahan, mewujudkan tertib arsip, melaksanakan amanat penerapan SPBE, menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memanfaatkan guna korespondensi terintegrasi.

Bupati Kendal, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, ketiganya lebih menekankan tujuan penerapan aplikasi SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mewujudkan korespondensi secara *realtime*, dimana saja dan kapan saja. Selain itu ketiganya juga sepakat bahwa tujuan penerapan lainnya adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bapak Dico M Ganinduto, B.Sc. selaku Bupati Kendal dalam memahami penerapan aplikasi SRIKANDI ini sebagai wujud kepatuhan amanat kebijakan terkait SPBE serta suatu digitalisasi proses bisnis layanan administrasi pemerintahan yang semula menggunakan kertas dan ATK berubah menjadi berbasis elektronik. Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melihat tujuan penerapan SRIKANDI tidak hanya memenuhi amanat kebijakan SPBE, tetapi juga dalam rangka pengelolaan arsip yang tertib secara elektronik. Hal serupa dinyatakan oleh Bapak Joko Suprayoga, S.Pi. M.M. selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal bahwa keberadaan SRIKANDI untuk memudahkan pengelolaan arsip di lingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pemahaman program dalam penerapan aplikasi SRIKANDI, menunjukkan bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh pengguna. Seluruh informan menjabarkan pemahaman program ini dalam beberapa segmentasi pembahasan maka itu menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap penerapan aplikasi SRIKANDI.

Ketepatan Sasaran

Pada dimensi ketepatan sasaran, berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, terdapat dua segmentasi pembahasan terkait ketepatan kelompok sasaran Program dan pemerataan informasi bagi kelompok sasaran. Pada segmentasi ketepatan kelompok sasaran program, dijelaskan oleh Budiani yaitu hal ini terkait sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal pencapaian kelompok sasaran pengguna di Pemerintah Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal menyatakan bahwa penerapan SRIKANDI hanya sampai dengan setingkat eselon IV atau yang saat ini dijabat oleh para subkoordinator serta para pejabat fungsional tertentu. Informasi serupa diungkapkan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa sampai dengan saat ini pengguna SRIKANDI yaitu subkoordinator dan arsiparis.

Dimensi ketepatan sasaran tidak hanya mengenai kelompok sasaran program, tetapi juga mengenai pemerataan informasi terhadap kelompok sasaran yang dituju. Pemerataan informasi tersebut berkenaan dengan isi program meliputi tujuan, sasaran, serta teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI. Afandi dan Warjio menyatakan bahwa:

Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Pemerataan informasi telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan aplikasi SRIKANDI terhadap seluruh perangkat daerah. Namun, untuk kelompok setingkat eselon IV atau yang saat ini dijabat oleh subkoordinator dalam satu perangkat daerah, yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut hanya perwakilannya. Artinya, tidak semua pengguna dihadirkan untuk diberikan sosialisasi atau bimbingan teknis secara langsung. Untuk meminimalisasi kesenjangan pemahaman dalam penerapan SRIKANDI, terdapat upaya pendampingan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dengan memerintahkan arsiparis atau pelaksana penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai pendamping konsultasi pada masing-masing kelompok sasaran di tiap perangkat daerah.

Ketepatan Waktu

Pada dimensi ketepatan waktu dalam penerapan suatu program menjadi hal yang penting karena merupakan perwujudan prinsip efisiensi dan ketepatan pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Dengan adanya tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Apabila tujuan dan sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana maka dapat dikatakan efektif. Suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

Target waktu penerapan SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal disampaikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal bahwa sampai dengan tahun 2023 telah tercapai. Adapun target tahun 2024, penerapan SRIKANDI dilaksanakan pada pemerintah desa, kemudian dilanjutkan ke sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Kendal. Hal ini sejalan dengan perencanaan tindak lanjut pada laporan evaluasi penerapan SRIKANDI yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2023 bahwa direncanakan Agustus - Desember tahun 2023 sebanyak dua puluh kelurahan di Kecamatan Kendal; Januari-Maret 2024 UPTD di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Kendal selain UPTD Pasar; dan April-Desember 2024 desa di seluruh Kabupaten Kendal. Ketepatan waktu pelaksanaan penerapan aplikasi SRIKANDI akan mendorong pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Tercapainya Tujuan

Pada dimensi tercapainya tujuan, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada seluruh informan terdapat tiga segmentasi pencapaian tujuan yaitu pencapaian pemerintahan efektif dan efisien, pencapaian korespondensi secara *realtime*, serta pencapaian pengelolaan arsip yang tertib. Dimensi ini menilai efektivitas suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai.

Tujuan penerapan AUBKD disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang kearsipan dinamis yang berkualitas dan terpercaya di instansi pusat dan pemerintah daerah; mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan kearsipan dinamis berbasis elektronik; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE bidang kearsipan dinamis di instansi pusat dan pemerintah

daerah. Apabila disandingkan dengan segmentasi yang terbentuk dari hasil wawancara maka mengarah pada pencapaian tujuan awal penerapan AUBKD.

Pada pencapaian tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, hal tersebut paling banyak dibahas oleh para informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal bahwa terdapat perubahan perilaku dalam pengelolaan arsip dinamis serta efisiensi belanja alat tulis kantor. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan dalam Laporan Evaluasi Penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal bahwa terdapat penghematan belanja ATK khususnya dalam pengadaan kertas sebanyak 17 % sekitar Rp.1,7 M (Rp.1.717.442,637) dan biaya kurir (SPPD dan BBM) pada Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2023.

Selanjutnya, dengan menggunakan SRIKANDI, korespondensi akan lebih cepat ditangani karena pejabat yang menandatangani surat bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Demikian halnya dengan penerima disposisi bisa mengakses SRIKANDI secara *realtime*. Keunggulan lain SRIKANDI bukan hanya bisa melaksanakan korespondensi secara elektronik di antara perangkat daerah dalam internal pemerintah daerah, melainkan juga korespondensi eksternal antara instansi pusat dan pemerintah daerah lainnya. Menurut Bapak Wahyu Yusuf Akhmadi, S.STP, M.Si. selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal mengatakan bahwa:

Dengan adanya SRIKANDI, dimanapun pejabat yang menandatangani, bisa melaksanakan tanda tangan, dimanapun dan kapanpun. Kegiatan surat menyurat di Pemerintah Kabupaten Kendal tidak terbatas waktu dan jarak agar pelayanan lebih efektif dan efisien dalam rangka menerapkan SPBE.

Terwujudnya tujuan pengelolaan arsip yang tertib dapat dirasakan dalam pemanfaatan arsip untuk akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam aplikasi SRIKANDI terdapat fitur pemberkasan arsip sehingga apabila arsip di dalamnya telah diberkaskan, lalu dilakukan pencarian kembali, arsip dapat dengan mudah ditemukan. Berkenaan dengan tujuan ini, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal sebagai pembina kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal menyatakan bahwa keberadaan SRIKANDI mendorong pengelolaan arsip yang tertib. Hal yang sama dinyatakan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagai pengguna bahwa dengan menggunakan fitur pemberkasan pada SRIKANDI berdampak pada pencarian arsip menjadi lebih mudah.

Perubahan Nyata

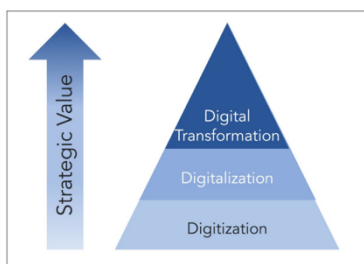
Berdasarkan analisis hasil penelitian melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, perubahan nyata pada mekanisme kerja telah dapat dirasakan. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam berkorespondensi cukup dengan menggunakan SRIKANDI tidak lagi secara manual sehingga pelayanan administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Dampak lain tidak hanya mengubah mekanisme tetapi juga pola penganggaran di Pemerintah Kabupaten Kendal, terdapat penghematan dalam belanja alat tulis kantor dan biaya distribusi persuratan.

Demikian halnya dalam mekanisme pengelolaan arsip dinamis, sebagai suatu aplikasi di bidang kearsipan yang memanfaatkan Teknologi dan informatika, dengan penggunaannya juga mengubah pola pemberkasan yang biasanya dilaksanakan secara manual karena dihadapkan dengan kertas atau media konvensional, sehingga berubah menjadi pengelolaan arsip elektronik. Menurut pernyataan Bapak Wahyu Yusuf Akhmadi, S.STP, M.Si. selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal bahwa terdapat perubahan perilaku dalam pengelolaan arsip dinamis. Selain itu terdapat efisiensi belanja alat tulis kantor. Dalam pernyataannya, ia tidak memungkiri bahwa masih terdapat praktik-praktik yang kurang efisien, misalnya pendisposisian naskah dinas masih terdapat tindakan mencetak naskah dinas digital ke dalam bentuk kertas. Perilaku tersebut tidak terlepas dari *mindset* personal pegawai yang masih belum beralih dari budaya konvensional ke budaya digital.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sebagai pengguna menyatakan bahwa dalam penciptaan surat sudah beralih surat dari manual ke digital dengan menggunakan SRIKANDI, tetapi belum seluruhnya. Penggunaan kertas masih pada praktiknya karena terdapat pihak rekanan/relasi dari instansi yang tidak menggunakan SRIKANDI, misalnya komunitas nelayan, UKM perikanan, dan pembudidaya ikan, sehingga mereka masih harus mencetak naskah dinas dan manual dalam pengirimannya ketika berkorespondensi. Namun, untuk ke seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kendal, mereka sudah menggunakan SRIKANDI.

Perubahan nyata atas penerapan SRIKANDI akan mendukung tujuan penyelenggaraan SPBE di Indonesia yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Perubahan nyata dari penerapan SRIKANDI saat ini dalam analisis peneliti yaitu masih dalam fase digitalisasi karena kondisi saat ini baru menggambarkan bagaimana teknologi digital atau teknologi informasi dapat digunakan untuk memodifikasi prosedur bisnis yang ada (Verhoefa, 2019). Penggunaan aplikasi SRIKANDI telah mengubah proses bisnis terutama yang sangat dirasakan terkait dengan

korrespondensi antara pengguna bukan hanya internal Pemerintah Kabupaten Kendal tetapi juga lintas instansi. Keberadaan teknologi digital digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang ada, baik dengan mempermudah koordinasi proses secara lebih efektif atau dengan menambahkan nilai sehingga pelayanan administrasi pemerintahan menjadi lebih baik.



Gambar 4. Fase Transformasi Digital (Palfreyman, 2020)

Fase transformasi digital belum dapat dijangkau pada masa sekarang karena penerapan SRIKANDI masih belum masif dengan memanfaatkan keseluruhan fungsi dalam aplikasi. Di sisi lain, SRIKANDI belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga data atau informasi yang disimpan di dalam SRIKANDI belum mendatangkan manfaat yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama transformasi digital adalah untuk meningkatkan efisiensi, manajemen risiko, serta menemukan peluang bisnis baru. Jika proses digitasi dan digitalisasi sudah dilaksanakan dan berhasil baik, transformasi digital dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengendalian

Para informan dan data menunjukkan bahwa dalam efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal tidak terlepas dari pengendalian penerapan program. Gibson menyatakan bahwa terdapat tujuh kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi atau program yang dilaksanakan, salah satunya adalah sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Juliani et al., 2023; Nurmawan et al., 2019). Sistem pengawasan dan pengendalian yaitu dilakukan untuk mengatur dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan program. Harold Koontz, menyebutkan bahwa pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselesaikan (Dilo & Tatu, 2022; Tatu et al., 2019).

Pengendalian dalam penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal dilaksanakan dalam bentuk monitoring berkala setiap triwulan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dalam setiap forum-forum koordinasi yang melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Selain itu, pengendalian juga dilaksanakan dalam bentuk evaluasi internal yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal yang laporannya disampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dalam hal pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal setiap tahunnya dilaksanakan pengawasan kearsipan internal oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal kepada seluruh perangkat daerah. Dalam pengawasan kearsipan internal tersebut disinggung bagaimana proses pengelolaan arsip dinamis dalam media arsip kertas maupun elektronik/digital.

Selain pengendalian internal, pengendalian dari pihak eksternal juga dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pembina kearsipan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengendalian menjadi alat pengukuran efektivitas penerapan SRIKANDI, hal tersebut terbukti efektif diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kendal. Hasil yang beragam dari instrumen penilaian yang bersinggungan dengan penerapan SRIKANDI memberikan rekomendasi perbaikan atas kondisi faktual yang saat itu dinilai. Dengan demikian, pengendalian sebagai katalisator untuk pencapaian tujuan penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dukungan Pimpinan

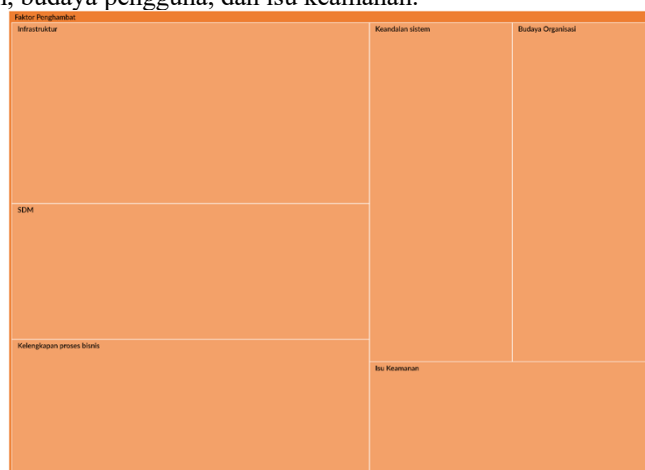
Gibson mengembangkan paradigma bahwa efektivitas dipengaruhi oleh variabel situasi yaitu *position power* dan juga dipengaruhi oleh variabel perilaku kepemimpinan dan sifat-sifat kepemimpinan (Hasba, 2020; Mesiono, 2018). Perilaku kepemimpinan dapat menjadi alat ukur sejauh mana efektivitas penerapan suatu program. Perilaku kepemimpinan dalam bentuk dukungan pimpinan terhadap penerapan program, menentukan ketepatan serta kecepatan dalam pencapaian tujuan penerapan program tersebut.

Dalam penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal, sikap Bupati Kendal dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan terkait yang diterbitkannya. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, diperoleh informasi bahwa penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan program seratus hari kepemimpinan Bupati Kendal terpilih, Bapak Dico M. Ganinduto, B.Sc. Atas komitmen Bupati Kendal dalam penerapan SRIKANDI, Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kearsipan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai implementator SRIKANDI di tingkat pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang Mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dimensi dukungan pimpinan dapat mengukur efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal. Pimpinan dapat menggerakkan beberapa kewenangan yang dimilikinya guna mencapai penerapan program yang efektif. Monica mengatakan bahwa terdapat mekanisme khusus dalam pencapaian dan peningkatan efektivitas penerapan suatu program yang digunakan oleh pemimpin yaitu penetapan tujuan strategi, perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi dan inovasi organisasi.

Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut secara berurutan faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal: infrastruktur, kemampuan SDM, kelengkapan proses bisnis, keandalan sistem, budaya organisasi, dan isu keamanan.



Gambar 5. *Hierarchy Chart* Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan SRIKANDI

1. Ketersediaan Dukungan Infrastruktur

Faktor penghambat ini merupakan faktor yang sering diungkap pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap para informan. Gejala yang timbul adalah kelambatan aplikasi dalam menerima perintah atau input dari pengguna sehingga proses lambat tersebut berdampak pada keengganan pengguna untuk melanjutkan proses korespondensi melalui SRIKANDI. Kelambatan ini biasanya terjadi pada hari dan jam kerja sehingga berdampak terhadap layanan administrasi pemerintah yang melamban. Aplikasi SRIKANDI mengalami kelambatan akibat ketersediaan infrastruktur berupa server yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tidak sebanding antara kebutuhan kapasitas server dengan aktivitas pengguna yang banyak dalam satu waktu yang bersamaan. Pusat Data Nasional yang secara teknis pengaturannya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dinilai belum memenuhi kebutuhan penerapan SRIKANDI.

Berdasarkan data pengguna SRIKANDI secara nasional tercatat sejumlah 690 instansi, 399.182 unit kerja, serta 839.909 pengguna aktif. Kondisi ini semakin hari mengalami kecenderungan peningkatan karena sosialisasi terus-menerus yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada kelompok sasaran instansi pusat maupun pemerintah daerah serta wujud kepatuhan terhadap amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kondisi keterbatasan server pada Pusat Data Nasional perlu disesuaikan kapasitasnya sehingga akses SRIKANDI menjadi lebih cepat. Kelambatan akses pada aplikasi SRIKANDI berdampak pada menurunnya minat dan kepercayaan pengguna dalam pemanfaatannya, sehingga tidak tercapai tujuan pemanfaatan teknologi, penerapan *e-government* didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi, menemui/memenuhi ekspektasi warga dan meningkatkan hubungan antarwarga negara, serta memfasilitasi pembangunan ekonomi.

Keberadaan teknologi seharusnya membantu mempercepat proses bisnis sehingga meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah.

Selain itu, faktor penghambat terkait infrastruktur lainnya adalah ketersediaan akses internet yang kuat. Oleh karena penggunaan aplikasi ini berbasis internet, keberadaan akses internet menjadi keharusan sehingga aplikasi dapat difungsikan, terutama pada area *blankspot*. Untuk mengatasi akses internet yang tidak merata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal telah menginventarisasi permasalahan dan menyampaikannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam penyediaan internet sampai ke desa-desa sehingga penerapan SRIKANDI berjalan optimal menghubungkan seluruh simpul perangkat daerah.

2. Kemampuan SDM sebagai Pengguna

Faktor penghambat lainnya adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan SRIKANDI. Menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, terkait SDM di Pemerintah Kabupaten Kendal sebagiannya belum melek teknologi sehingga merasa kesulitan untuk menggunakan SRIKANDI karena belum siap beralih ke mekanisme kerja secara digital.

3. Kelengkapan proses bisnis

Dalam suatu arsitektur SPBE nasional, SRIKANDI merupakan salah satu aplikasi umum yang akan terintegrasi dengan aplikasi umum lainnya. Sebagai suatu aplikasi umum, SRIKANDI pun memiliki rancangan awal proses bisnis dalam pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Sampai dengan saat ini fitur yang tersedia masih sampai dengan pemberkasan arsip sebagai bagian tahapan pemerliharanaan arsip. Untuk fitur penyusutan arsip masih belum disiapkan. Dengan demikian proses pengelolaan arsip dinamis yang utuh belum dapat dilaksanakan. Oleh karena fitur penyusutan arsip belum tersedia sehingga proses tersebut belum dilakukan di dalam sistem aplikasi.

4. Keandalan Sistem

Ketersediaan infrastruktur yang baik akan berdampak pada sistem yang baik pula. Sistem pada aplikasi SRIKANDI itu meliputi sistem yang ada di dalam dan di luar aplikasi. Di dalam aplikasi, terdapat kesulitan melakukan verifikasi berupa koreksi naskah dinas secara langsung di dalam aplikasi. Proses koreksi harus dilakukan di luar sistem dengan cara mengunduh *file* terlebih dulu, lalu mengunggah kembali jika sudah benar. Berikutnya persoalan sistem namun berada di luar aplikasi yaitu mekanisme pengaduan yang ditujukan kepada tim *helpdesk* belum dibuat sistem yang andal, meskipun terdapat portal Pusat bantuan SRIKANDI, namun pelaksanaannya belum efektif, *representative assistant* belum dapat secara cepat menanggapi atau menjawab persoalan pengaduan. Penyediaan *whatsapp group* untuk layanan koordinasi dan komunikasi dengan para administrator lembaga/pemerintah daerah menjadi sarana pengaduan yang dianggap paling cepat sampai, namun karena mekanisme yang tidak teratur sehingga menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya.

5. Budaya Organisasi

Faktor penghambat penerapan aplikasi SRIKANDI lainnya adalah faktor budaya. Menurut Kreitner dan Kinicki menyatakan bahwa budaya organisasi adalah perangkat asumsi yang dibagi dan diterima secara implisit begitu saja, dipegang oleh satu kelompok yang menentukan bagaimana hal itu dirasakan, dipikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam (Kreitner dan Kinicki, 2014). Budaya organisasi ini dibentuk kembali dengan komitmen kuat dari ekosistem yang melingkupinya. Mekanisme kerja yang dibangun dalam kerangka penyelenggaraan SPBE adalah pemanfaatan teknologi dan informatika untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah. Perubahan mekanisme kerja ini menimbulkan kesenjangan di tengah pengguna yang merupakan aparatur pemerintah dengan berbagai jenjang pendidikan.

Merujuk pada hasil sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal mengenai komposisi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Kendal berdasarkan latar belakang pendidikan, terdapat 64,59% pegawai negeri merupakan lulusan minimal/setidaknya S1 (sarjana), sehingga dapat diasumsikan bahwa penguasaan terhadap teknologi, informatika, dan komunikasi dapat lebih mudah diterima sebagai suatu pembaruan/transisi dalam mekanisme kerja. Namun demikian, persepsi ini akhirnya tidak reliabel jika budaya bekerja secara manual masih diterapkan. Kondisi tersebut tergambar dari perangkat daerah yang sudah memiliki akun sebagai pengguna aktif SRIKANDI namun transaksi penerbitan surat keluar masih minim. Hal itu menggambarkan bahwa transisi budaya bekerja di Pemerintah Kabupaten Kendal untuk beralih sepenuhnya ke pengelolaan arsip secara digital masih menjadi kendala.

6. Isu Keamanan

Sebagaimana telah diuraikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Kendal tentang isu keamanan sebagai salah satu penghambat efektivitas penerapan aplikasi SRIKANDI, yang dimaksudkan adalah potensi risiko kebocoran data misalnya akses arsip yang bersifat rahasia. Isu keamanan juga meliputi risiko kehilangan data di dalam aplikasi. Pengusulan mekanisme *mirroring* dengan penyediaan server untuk

back up data belum dapat dipertimbangkan sebagai solusi atau upaya mengatasi hambatan karena prinsip penggunaan aplikasi umum yaitu tersimpan sebagai Satu Data Indonesia pada Pusat Data Nasional.

Rencana Tindak Lanjut Pencapaian Efektivitas Penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rencana tindak lanjut guna mencapai efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyediaan infrastruktur yang memadai melalui koordinasi dengan pihak terkait apabila terkait kemampuan penyimpanan server Pusat Data Nasional. Selain itu, untuk ketersediaan jaringan internet, Dinas Komunikasi dan Informatika segera menuntaskan strategi pengentasan *blanspot area* baik dengan penyediaan infrastruktur berdasarkan APBD maupun bekerja sama dengan pihak yang *concern* dengan penyediaan jaringan sampai peloksok.
2. Penguatan kemampuan teknis bagi pengguna melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal. Kegiatan ini agar melibatkan seluruh pengguna/pemlik akun *live* SRIKANDI.
3. Penyempurnaan proses bisnis aplikasi menjadi utuh sesuai perancangan awal, yaitu pengelolaan arsip dinamis agar dilanjutkan sampai dengan pemanfaatan fitur penyusutan arsip.
4. Penyempurnaan keandalan sistem melalui penyediaan mekanisme pengaduan melalui kanal yang tersistem, baik di Pemerintah Kabupaten Kendal maupun di pemerintah pusat. Hal ini tergantung persoalan pengaduan yang disampaikan sehingga penyelesaiannya lebih cepat dan akurat.
5. Pengendalian secara berkala dan berkelanjutan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal dari Pemerintah Kabupaten Kendal.
6. Peningkatan keamanan aplikasi untuk menjamin kepercayaan pengguna SRIKANDI melalui kegiatan audit secara berkala soal keamanan dan program peningkatan keamanan SRIKANDI secara berlapis.

KESIMPULAN

Tujuh dimensi efektivitas penerapan program yang terdiri atas: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata, pengendalian, dan dukungan pimpinan, sudah ada dan melekat pada penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal. Terdapat dua dimensi yang mempunyai kontribusi terbesar dalam efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu: pemahaman program dan ketepatan sasaran. Faktor-faktor penghambat efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu ketersediaan dukungan infrastruktur, kemampuan SDM pengguna, kelengkapan proses bisnis aplikasi, keandalan sistem, budaya organisasi, dan isu keamanan. Rencana tindak lanjut untuk mewujudkan efektivitas penerapan SRIKANDI di Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu fasilitasi penyediaan infrastruktur yang memadai, penguatan kemampuan teknis bagi pengguna, penyempurnaan proses bisnis aplikasi, penyempurnaan keandalan sistem, pengendalian secara berkala dan berkelanjutan, dan peningkatan keamanan aplikasi.

REFERENSI

- Amryudin, A. D. K., Dharmaningias, D. S., Savira, E. M., Katharina, R., & Sejati, S. B. (2021). *Kebijakan Satu Data Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Annisa, H. (2022). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simantab Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(2).
- Bandur, A., & Budiastuti, D. (2018). Validitas Dan Reliabilitas Penelitian. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95.
- Dilo, A. U., & Tatu, H. R. (2022). Pengendalian Pendidikan Terhadap Media Pembelajaran Dalam Urgensi Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Islamic Education Management Research*, 1(1), 43–54.
- Handayani, T. A. (2023). Dimensi Disposisi Atau Sikap Pelaksana Dalam Implementasi Ke-Bijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Media Bina Ilmiah*, 18(4), 867–874.
- Hasba, S. (2020). Peran-Peran Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Di Lembaga Pendidikan Islam. *Shautut Tarbiyah*, 26(2), 272–295.
- Juliani, R., Aneta, Y., & Tui, F. P. D. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Dulupi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3373–3382.

- Mesiono, M. (2018). *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability And Power Leadership*.
- Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 115–124.
- Nurmawan, A. R., Saadah, K., & Suwondo, S. (2019). Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar*, 10(1), 1274–1284.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex Lata*, 5(2).
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Tatu, H. R., Asiah, S., & Mala, A. (2019). Pengendalian Pendidikan Terhadap Media Pembelajaran Dalam Urgensi Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid–19. *Jurnal Al Himayah*, 3(2).
- Warman, N. S., Syamsir, S., Maldini, M., Nurhasanah, O., Oktariandani, N. R., & Syafikruzi, I. H. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(2), 132–148.